



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	6 SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

# BPN Janjikan Pembayaran Lahan

## Pembangunan Tol Serang-Panimbang

RANGKASBITUNG, BANPOS - Terkait warga Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang menginginkan pembayaran lahan terpakai pembangunan Tol Serang-Panimbang.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak berjanji membayar tanah sisa milik warga yang tidak terkena Right Of Way (ROW) atau daerah milik jalan pada pembangunan jalan tol Serpan. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Lebak, M Didi Ali Subandi usai rapat bersama perwakilan PT Wijaya Karya (PT Wika), PT Wika Serang-Panimbang (PT WSP), Kades Bojongcae, Kades Panancangan serta Camat Cibadak, di Kantor BPN Lebak dalam rangka merespon protes warga Cibadak tersebut.

"Terkait dengan lahan-lahan yang belum dibayar termasuk lahan sisa. Saya pikir saat ini belum masuk ke dalam ranah tanah sisa, karena bagi saya wajibnya saja belum selesai apalagi sunahnya," kata Didi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, untuk tanah sisa bisa dibayarkan, akan tetapi harus melalui mekanisme tertentu berdasarkan kajian dan peraturan perundang-undangan. "Memang untuk tanah sisa itu memerlukan kajian, kalau dalam un-



Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Lebak, M Didi Ali Subandi saat memberikan penjelasan.

dang-undang bahwa tanah sisa itu bisa dibayarkan apabila dengan kondisi tertentu misalkan tidak ada akses atau sudah tidak memungkinkan lagi atau bahkan tanahnya tidak mungkin bisa digarap baik untuk pertanian atau perumahan lagi," terangnya.

Namun lanjut Didi, untuk menyatakan lahan dalam kondisi tertentu itu siapa yang akan melakukan kajian. Sehingga harus cermat dalam menentukannya.

"Untuk kondisi-kondisi seperti itu kita harus cermat dan mengkaji, siapa yang bisa menyatakan bahwa kondisi tanah tersebut bisa layak terpakai atau

tidak terpakai. Saya kira panitia juga mungkin ada teknisnya nanti, apakah bidang ini ada akses atau tidak ada akses dan kita on the spot dulu," ujarnya.

Didi menambahkan, pihaknya nanti akan mengarahkan untuk dilakukan pembentukan tim kajian, tapi sebelum itu pihaknya akan fokus kepada ang wajibnya terlebih dahulu.

"Karena dalam penentuannya ini masuk ke dalam teknis bahwa tanah tersebut bisa, layak atau tidak layak untuk dibayarkan terhadap sisanya. Kita akan kearah sana nanti pada saat wajibnya setelah seratus persen. Kita fokus dulu di ROW dan kita akan melang-

kah kepada tanah sisa," ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Bojongcae, Yusuf membenarkan, adanya tanah sisa yang terkena urugan tanah. "Betul sebagian ada tanah sisa tidak terkena ROW tapi terkena urugan," katanya.

Ditempat sama Kepala Desa Panancangan, Subadri menuturkan, sementara ini di wilayahnya tidak ada pengajuan protes terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tol.

"Waktu itu memang ada tanah warga kena urugan, terus kita cek lokasinya. Setelah itu kita menghubungi orang WIKA, jam itu juga langsung dikeruk pakai ekskavator," katanya. (DHE/IM)